PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TAWURAN PELAJAR OLEH POLISI RESOR KOTA PADANG

Oleh: Harisul Huda

Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiaraputri, SH., MH

Alamat: Jl. Sekolah Nomor A4 Arifin Ahmad Pekanbaru

Email: harisulhuda@gmail.com

Abstract

Seeing the situation and conditions that occur in the city of Padang often brawls between high school students (high school) and or vocational high school (SMK) so that makes researchers interested in reviewing it legally, because these situations and conditions often occur repeatedly. Triggers brawl is usually a sense of revenge, with a high sense of solidarity these students will reciprocate the treatment caused by school students who are considered harmful to a student or defame the school. This paper discusses criminal law enforcement conducted by the Padang District Police against brawlers between students in the Padang City jurisdiction, the obstacles faced by the Padang District Police in carrying out criminal law enforcement efforts against student brawls in the Padang City legal area and efforts made by the Padang City Police in anticipating against student brawlers.

The research method is a sociological legal research that is research that wants to see the correlation of law with the community, so that it can reveal the effectiveness of the law in society and identify unwritten laws that apply to the community by jumping directly into the research location. Location of the study in Padang Police, researchers collected data consisting of primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques namely questionnaire, interview and literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.

The conclusion of this research is that the criminal law enforcement conducted by the Padang District Police against brawl perpetrators between students in the legal area of the City of Padang has not been effectively implemented, while law enforcement can guarantee legal certainty, order and legal protection. The obstacle in upholding criminal law against student brawls in the legal area of Padang City is firstly the lack of adequate means of vehicles to conduct patrols is still very limited, so that the police are still difficult to reach small alleys to monitor conditions that are said to be prone to misbehavior adolescents, secondly the lack of parental supervision of children and thirdly the lack of public trust in law enforcement officials. So that in the future the Padang City government should support the police and the TNI to cooperate in securing and preventing student brawls, so that in the future they can anticipate student brawls in the City of Padang.

Keywords: Student - Student Fight - Padang Police Station.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak sekali alasan yang bisa menjadikan tawuran antar-pelajar terjadi. Pelajar sering kali tawuran hanya karena masalah sepele, seperti saling ejek, berpapasan di bus, pentas seni, atau pertandingan sepak bola, permasalahan pacar berbeda sekolah dan dendam lama antar sekolah atau aksi saling balas dendam, juga akhir-akhir yang berkembang dimedia sosial aksisaling membuly yang berakhir pada proses hukum.¹

Beberapa tahun terakhir literatur ilmiah tentang dampak paparan terhadap kekerasan pada perkembangan anak-anak telah menjadi canggih, dan sekarang ada sumber-sumber yang menggambarkan ancaman perkembangan dan faktor-faktor ketahanan yang umum menyerang anak-anak dari rumah-rumah kekerasan.² Banyak evaluasi pencegahan kejahatan menghilangkan tindakan kejahatan dan hanya menjelaskan bagaimana program bekerja dan layanan yang mereka berikan.³ Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Kota Padang sering terjadinya tawuran antar pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan atau sekolah menengah kejuruan (SMK),⁴ sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya secara hukum, karena situasi dan kondisi tersebut sering terjadi berulang-ulang kali.

Terjadi suatu kasus Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Rasuna Said Kota Padang, aksi tawuran antara SMK Negeri 5 Padang dengan SMK Muhammadiyah, aksi ini diduga telah di rencanakan atau telah melakukan perjanjian terlebih dahulu, karena jumlah pelajar yang ikut serta berjumlah puluhan, kejadian baru diketahui setelah seorang warga menghubungi pihak Polisi Resor Kota Padang, mendapat laporan petugas

langsung mengejar puluhan pelajar tersebut, tetapi mereka berhasil meloloskan diri, akibat dari kejadian tersebut rusak nya 2 unit mobil masyarakat yang melintasi jalan Jl. Rasuna Said pada saat itu yang terkena lemparan batu dan mengakibatkan pecah nya kaca kendaraan tersebut.

Dan juga telah terjadi aksi tawuran pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Pukul 16.30 WIB bertempat di Lap. Imam bonjol Kota Padang telah terjadi Tawuran antar SMK KOSGORO dan SMA PERTIWI 2, kejadian tersebut berawal dari memperebutkan tempat kekuasaan, mereka secara bersama dan terang-terangan melakukan aksi tersebut kemudian terjadi aksi kekerasan yang bermula dari kejar-kejaran sehingga melempar batu yang menyebabkan warung dan kendaran milik masyarakat rusak, anggota SPK Polisi Resor Kota Padang kemudian berhasil mengamankan 9 orang pelaku yang selanjutnya diamankan di Polisi Resor Kota Padang.⁵

Tabel 1.1
Jumlah Tawuran Antar Pelajar di Kota Padang
Pada Tahun 2014 s/d 2018

No	Tahun	Jumlah Siswa yg Tawuran	Korban		
			Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
1	2015	36	23	11	2
2	2016	42	24	16	2
3	2017	23	20	3	-
4	2018	63	38	21	4
5	2019	44	27	17	-

Sumber: Data Polisi Resor Kota Padang, Tahun 2019

Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Barangsiapa
2. Terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan Kekerasan
5. Terhadap orang atau barang

Dilihat dari unsur-unsur pasal diatas sudah jelas apa yang dilakukan siswa tersebut memenuhi unsur pidana pasal 170 ayat (1). Pertanyaannya adalah apakah seorang anak yang memenuhi unsur

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d00a30030933/tawuran-dan-bully-berakhir-pada-hukum--/>diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

² Patricia Van Horn, "The Court's Role In Supporting And Protecting Children Exposed To Domestic Violence", *Journal of the Center for Families*, 2005, hlm. 3

³ Sanjeev S. Anand, "The Criminal Justice System and Youth Crime Prevention", *Queen's Law Journal*, 1999, hlm. 4.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4541315/26-orang-pelaku-tawuran-di-padang-ditangkap>.diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

⁵ Wawancara dengan Bapak, *Kompil Darto*, Kasat Binmas Polresta Padang, Hari Rabu 18 Februari 2019, Bertempat di Polresta Kota Padang.

pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan apakah anak tersebut dapat ditahan? Merujuk pada definisi anak dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁶

Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Dari penjelasan tersebut artinya usia anak 12 tahun hingga 18 tahun tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana akan tetapi proses tersebut tetap harus melalui sistem peradilan anak.⁷ Dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 angka 2 “Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”⁸ Yang mana itu artinya pidana penjara yang bisa di jatuhkan ke anak setengah dari maksimum ancaman pidana penjara untuk orang dewasa.

Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga*

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat disekitar lokasi tawuran, masyarakat merasakan keresahan dan ketidak nyamanan atas tindakan yang dilakukan siswa-siswa tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul yang berkaitan dengan: “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Oleh Polisi Resor Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan Polisi Resor Kota Padang terhadap pelaku tawuran antara pelajar di wilayah hukum Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Polisi Resor Kota Padang dalam melakukan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di wilayah hukum Kota Padang?
3. Upaya apakah yang dilakukan Polisi Resor Kota Padang dalam mengantisipasi terhadap pelaku tawuran pelajar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dilakukan Polisi Resor Kota Padang terhadap pelaku tawuran antara pelajar di wilayah hukum Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi Resor Kota Padang dalam melakukan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di wilayah hukum Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan Polisi Resor Kota Padang dalam mengantisipasi terhadap pelaku tawuran pelajar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara-1 pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat dalam permasalahan penegakan hukum pidana yang dilakukan Polisi terhadap pelaku tawuran antara pelajar di wilayah hukum Kota Padang.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ <http://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/> diakses, tanggal, 4 Februari 2019.

⁸ Pasal 81 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi kalangan mahasiswa/mahasiswi serta masyarakat umum.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait dalam menentukan kebijakan dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Secara teori, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹¹

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga

dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹³
2. Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan).¹⁴
3. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah – ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya.¹⁵
4. Penegakan hukum adalah menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap

¹² *Ibid.*

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>, diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelajar>, diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

¹⁶ Soejono soekanto, *Loc.cit*

¹⁷ Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 10.

tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian peneliti adalah *Polisi Resor Kota Padang*. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di *Polisi Resor Kota Padang*, karena melihat seringnya terjadi tawuran antar pelajar sekolah menengah atas dan/atau sekolah menengah kejuruan di Kota Padang yang mana perbuatan tersebut sangat tidak mencerminkan sebagai perbuatan seorang pelajar, dan juga melawan hukum atas perbuatan tersebut mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat di Kota Padang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.¹⁹ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. *Satbinmas Polisi Resor Kota Padang*
2. *Pelajar yang terlibat Aksi Tawuran di SMK KASGORO*

b. Sampel

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²¹ Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	<i>Satbinmas Polisi Resor Kota Padang</i>	2	2	100%
2	<i>Pelajar yang terlibat Aksi Tawuran di SMK KASGORO</i>	44	22	50%
3	<i>Jumlah</i>	46	24	-

Sumber: *Data Olahan Tahun 2019 Tawuran Pelajar Kota Padan*

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²² Dalam penelitian ini sumber data primer dari data yang diperoleh sendiri oleh penulis dari hasil kuisioner dan wawancara dengan responden, yaitu wawancara *Satbinmas Polisi Resor Kota Padang dan wawancara serta penyebaran kuisioner pada Pelajar yang terlibat aksi tawuran di SMK KASGORO*.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum skunder merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

c. Data Tertier

Data tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan

¹⁸ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²¹ *Ibid*, hlm. 121.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media grup, Jakarta, 2005, hlm.181.

²³ *Ibid*, hlm. 182.

terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa :

- a. Kuisioner, adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah
- b. disediakan jawaban-jawaban. Maka responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuisioner itu dibentuk pertanyaannya model esai, di mana hal ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya.
- c. *Wawancara*, yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.²⁴ Dan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- d. *Studi Kepustakaan*, Pada tahap ini peneliti mencari landasan terinci dari masalah penelitiannya sehingga penelitian bukanlah aktifitas "*trial and error*" aktifitas ini merupakan tahapan yang amat penting bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.²⁵

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif.²⁶ Untuk

menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik analisis data deduktif, yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁸ Dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁹

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena.³⁰

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi.³¹

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

²⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

³¹ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 63.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 112.

²⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial(Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.³² Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³³

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang

Dalam rencana tata ruang wilayah nasional telah ditetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping itu Kota Padang Kota juga sebagai Ibukota dan pusat pendidikan tinggi di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km. Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan wilayah lautan/perairan seluas 720,00 km². Secara geografis, Kota Padang berada di antara 00 44 00 dan 1 08 35 Lintang Selatan serta antara 100 05 05 dan 100 34 09 Bujur Timur.³⁵

Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan terdapat deretan Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 486,209 Km². Perpaduan kedua letak tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik. Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 – 1853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan.³⁶

B. Gambaran Umum Polisi Resor Kota Padang

Polisi Resor merupakan satuan organisasi Polisi Republik Indonesia yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polisi Resor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 80.

³³ *Ibid.* hlm. 75

³⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 41.

³⁵ <http://padang.go.id/konten/sejarah-kota-padang> diakses 18 November 2019

³⁶ *Ibid.*

Polisi Resor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan Polisi Resor Kota Padang Terhadap Pelaku Tawuran antara Pelajar di Wilayah Hukum Kota Padang

Pelajar SMA adalah pelajar yang berusia 15 (lima belas)-18 (delapan belas) tahun. Pada umur tersebut adalah waktu dimana seorang anak mulai mencari jati dirinya dalam rangka perkembangan mental anak. Lingkungan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam proses perkembangan mental anak karena disana lah anak melihat dan mengalami sendiri hal-hal yang terjadi di masyarakat. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang paling berpengaruh dalam pembentukan mental seorang anak. Sebagaimana dikatakan oleh Purnianti bahwa sekolah merupakan salah satu bagian dari organisasi sosial besar masyarakat. Hingga tingkat tertentu, dari satu segi, sekolah selain melatih ketrampilan kognitif juga berfungsi sebagai salah satu agen masyarakat dalam mensosialisasikan norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kepada siswa-siswanya.³⁸

Terjadi suatu kasus Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Rasuna Said Kota Padang, aksi tawuran antara SMK Negeri 5 Padang dengan SMK Muhammadiyah, aksi ini diduga telah di rencanakan atau telah melakukan perjanjian terlebih dahulu, karena jumlah pelajar yang ikut serta berjumlah puluhan, kejadian baru diketahui setelah seorang warga menghubungi pihak Polisi Resor Kota Padang, mendapat laporan petugas langsung mengejar puluhan pelajar tersebut, tetapi mereka berhasil meloloskan diri, akibat dari kejadian tersebut rusak nya 2 unit mobil masyarakat yang melintasi jalan Jl. Rasuna Said pada saat itu yang terkena lemparan batu dan mengakibatkan pecah nya kaca kendaraan tersebut.

Dan juga telah terjadi aksi tawuran pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Pukul 16.30 WIB bertempat di Lap. Imam bonjol Kota Padang telah terjadi Tawuran antar SMK KOSGORO dan SMA PERTIWI 2, kejadian tersebut berawal dari memperebutkan tempat kekuasaan, mereka secara bersama dan terang-terangan melakukan aksi tersebut kemudian terjadi aksi kekerasan yang bermula dari kejar-kejaran sehingga melempar batu yang menyebabkan warung dan kendaraan milik masyarakat rusak, anggota SPK Polisi Resor Kota Padang kemudian berhasil mengamankan 9 orang pelaku yang selanjutnya diamankan di Polisi Resor Kota Padang.³⁹

Untuk lebih memperjelas tentang kejahatan perkelahian pelajar, maka masalah tersebut dibagi menjadi 2 kelompok.

a. Perkelahian pelajar secara perorangan

Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan perkelahian pelajar secara perorangan diantaranya:⁴⁰

Pasal 351 (penganiayaan)

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 (Penganiayaan ringan)

- 1) Kecuali yang disebut didalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga

³⁷ <https://restapadang.wordpress.com/> diakses 18 November 2019

³⁸ *Ibid.* hlm. 31.

³⁹ Wawancara dengan Bapak, *Kompol Darto*, Kasat Binmas Polresta Padang, Hari Rabu 18 Februari 2019, Bertempat di Polresta Kota Padang.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, Cet.4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68-75.

bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana

Pasal 353 (Penganiayaan yang dipikirkan terlebih dahulu)

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengalami luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengalami kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 354 (Penganiayaan berat)

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengalami kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355 (Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu)

- a) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu (*met voor bedachten rade*). diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - b) Jika perbuatan itu mengalami kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Perkelahian pelajar secara berkelompok

Pasal-pasal dari KUHP yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan perkelahian pelajar secara berkelompok diantaranya: Pasal 170 (penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang)

- a) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b) Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

- 2) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

- 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan mati.

- 4) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 358 (turut serta melakukan penyerangan) Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam:

- a) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat.
- b) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut.⁴¹

Tabel IV.1
Jumlah Tawuran Antar Pelajar di Kota Padang
Pada Tahun 2014 s/d 2018

No	Tahun	Jumlah Siswa yang Tawuran	Korban		
			Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
1	2015	36	23	11	2
2	2016	42	24	16	2
3	2017	23	20	3	-
4	2018	63	38	21	4
5	2019	44	27	17	-

Sumber: Data Polisi Resor Kota Padang, 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus tawuran antar pelajar di Kota Padang yang dilakukan oleh pelajar pada tahun

⁴¹ Maulana hasan wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hal.24

2015 jumlah pelajar yang tawuran 36 orang dan pada tahun 2016 jumlah pelajar yang tawuran 42 orang. Artinya jumlah pelajar yang tawuran dari tahun 2015 hingga tahun 2016 selalu meningkat dan yang paling sering terjadi yaitu pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 Jumlah pelajar yang tawuran menurun yaitu berjumlah 23 orang, angka di tahun ini menurun disebabkan pada tahun 2017 tersebut pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak TNI dalam mengamankan dan mencegah terjadinya tawuran antar pelajar tersebut.⁴²

Akan tetapi kerjasama antar pihak kepolisian dan dengan pihak TNI dalam mengamankan dan mencegah terjadinya tawuran antar pelajar tersebut tidak berlanjut, hingga di tahun 2018 jumlah pelajar yang tawuran di Kota Padang kembali meningkat yaitu berjumlah 63 orang, tentunya ini menjadi tugas dari pihak kepolisian dan pemerintah, agar tawuran antar pelajar bisa dicegah dan diatasi dengan baik. Kerjasama pihak kepolisian dengan pihak TNI dalam mengamankan dan mencegah terjadinya tawuran antar pelajar tidak berlanjut, dikarenakan tidak adanya support dari pemerintah Kota Padang.⁴³ Sehingga penegakan hukum terhadap pelajar yang melakukan tawuran tetap harus diberlakukan.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Artinya apabila penegakan hukum terhadap pelajar yang melakukan tawuran tidak efektif maka menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Sehingga penegakan hukum terhadap pelaku tawuran Pelajar di di Wilayah Hukum Kota Padang masih lemah dan belum efektif terlaksana.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Di Wilayah Hukum Kota Padang

Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di wilayah hukum Kota Padang adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Kurangnya Sarana Yang Memadai

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polisi Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kenakalan remaja. Secara geografis, wilayah hukum Polisi Resor Kota Padang termasuk luas, sedangkan kendaraan untuk melakukan patroli masih sangat terbatas, sehingga pihak polisi masih sulit menjangkau gang-gang kecil untuk memantau keadaan yang dikatakan sebagai tempat rawan terjadinya tindak kenakalan remaja. Seandainya ada laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, pihak kepolisian tidak dapat cepat sampai ke lokasi kejadian sehingga para pelaku sudah terlanjur melarikan diri sebelum polisi sampai di lokasi.

2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak

Pengawasan orang tua terhadap anak mereka masih dinilai kurang baik. walaupun tidak semua orang tua, tetapi masih banyak didapati orang tua yang sebenarnya mengetahui bahwa anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengganggu nilai-nilai ketertiban umum, tetapi orang tua tersebut masih enggan untuk memberitahu anaknya bahwa perbuatan yang dilakukan anaknya itu tidak baik.

Pihak Kepolisian sendiri sudah berulang kali mendatangi rumah-rumah warga untuk mensosialisasikan tentang kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Maka dari itu peran orang tua juga sangat besar dalam pencegahan kenakalan remaja di wilayah hukum Polisi Resor Kota Padang. Orang tua sangat berperan penting dalam mengatasi kenakalan remaja. Agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja, maka yang perlu dilakukan orang tua adalah:

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak, *Kompol Darto*, Kasat Binmas Polresta Padang, Hari Rabu 18 Februari 2019, Bertempat di Polresta Kota Padang.

- a) Memberikan perhatian dan kasih sayang. Orang tua seharusnya mempunyai waktu bagi anaknya untuk mengobrol atau sekedar berkumpul. Sebaiknya orang tua menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak untuk menyampaikan semua yang dirasakannya.
- b) Memberi kebebasan, namun tetap memberikan pengawasan. Meskipun remaja masih membutuhkan pengawasan dari orang tua, namun orang tua juga harus memberi kebebasan kepada anak dan tidak boleh membuatnya merasa terkekang.
- c) Pengawasan terhadap berbagai media komunikasi seperti handphone, gadget, televisi, dan lain sebagainya.
- d) Anak perlu mempunyai dasar agama yang kuat. Orang tua sebaiknya memberikan pembelajaran agama kepada anak sesuai dengan kepercayaannya sedini mungkin dan sesering mungkin.
- e) Orang tua juga harus memberikan pendidikan serta bimbingan dalam membangun karakter serta kepribadiannya.
- f) Pengawasan terhadap pergaulan anak. Orang tua harus mengetahui dengan siapa dia berteman dan bagaimana kepribadian dari temannya tersebut. Mendukung hobby anak. Anak perlu mendapatkan dukungan dari orang tua dalam menyalurkan hobby nya. Oleh sebab itu sebaiknya para orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menyalurkan dan mengembangkan bakatnya.

3. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Pada Aparat Penegak Hukum

Masyarakat masih kurang percaya terhadap kinerja kepolisian sehingga terjadi pembiaran terhadap remaja yang melakukan tindakan kenakalan. Seandainya masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian dapat membina para remaja tersebut agar tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka semakin berkurangnya masyarakat yang mau melaporkan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat kepada polisi, dan karena laporan kejadian itu tidak sampai kepada Kepolisian, maka Polisi tidak akan mengetahui informasi bahwa telah terjadi suatu tindakan

kenakalan remaja di suatu tempat sehingga kasus tersebut tidak akan terungkap dan para pelakunya pun akan dengan leluasa melakukan tindakan kenakalan remaja, padahal mereka seharusnya dibina oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian tersebut.⁴⁵

Berikut tabel hasil kuisioner yang disebarakan penulis kepada pelaku tawuran antar pelajar di Polisi Resor Kota Padang:

Tabel. IV.1
Kuisioner

DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER DENGAN PELAJAR PELAKU TAWURAN				
NO	PERTANYAAN	JAWABAN		JUMLAH
		YA	TIDAK	
1	Apakah saudara/i pernah terlibat tawuran?	17	5	22
2	Apakah tujuan saudara/i melakukan tawuran untuk balas dendam atas perbuatan pelajar dari sekolah lain?	12	10	22
3	Apakah saudara/i mengetahui bahwa tawuran itu dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?	7	15	22
4	Apakah saudara/i pernah melakukan tawuran dengan kekerasan hingga menyebabkan adanya korban?	5	17	22
5	Apakah saudara/i pernah melakukan tawuran dengan kekerasan hingga menyebabkan adanya korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia?	8	14	22

Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan kuisioner diatas yang disebarakan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwasannya beberapa pelajar terlibat tawuran, pelajar melakukan tawuran untuk balas dendam atas perbuatan pelajar dari sekolah lain, selain itu hanya beberapa pelajar yang mengetahui bahwa tawuran itu dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelajar mengaku bahwa pernah melakukan tawuran dengan kekerasan hingga menyebabkan adanya korban, mulai dari adanya

⁴⁵ Tabah Anton, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*, CV. Sahabat, Klaten, 1996, hlm. 56.

korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Dari hasil wawancara baik dengan pelajar maupun pihak Polisi Resor Kota Padang, serta hasil dari kuisioner dapat dikatakan bahwa pelajar dalam melakukan tawuran khususnya di Kota Padang karena kurangnya rasa kekeluargaan, hingga memiliki rasa ingin balas dendam. Hal inilah yang harus menjadi sorotan atau perhatian dari pemerintah khususnya Polisi Resor Kota Padang.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan berdasarkan teori penegakan hukum bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

C. Upaya Polisi Resor Kota Padang Dalam Mengantisipasi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar

1. Upaya Hukum Pidana

Dalam hal pencegahan melalui upaya hukum Bapak Kompol Darto menjelaskan sebagai berikut: “Dalam upaya hukum pidana, kepolisian Kota Padang dapat melakukan tindakan yang disebut diskresi. Di Kepolisian Kota Padang terdapat 2 (dua) bentuk diskresi yang berbeda dan memiliki corak yang berbeda pula, bentuk pertama yaitu diskresi yang ditujukan kepada para pelaku tawuran yang tidak terbukti melanggar perbuatan pidana melainkan melanggar ketentuan pidana yang bersifat pelanggaran.⁴⁶

Sedangkan bentuk kedua dari tindakan diskresi yang diambil oleh Polisi Resor Kota Padang ialah tindakan diskresi dalam hal represif yustisial yang ditujukan kepada para pelaku tersebut merupakan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 1 tahun kurungan.” Dalam kasus tawuran yang sering dilakukan oleh pelajar atau anak yang terkadang berakhir dengan jatuhnya korban luka maupun

korban jiwa namun ketika polisi melakukan tindakan-tindakan represif seperti penangkapan pelaku tawuran, kecenderungan petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang disertai pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam tanda kutip “apabila” dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya korban luka ataupun adanya pihak yang melaporkan kerugian secara materiil. Hal ini searah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Darto, yang mengatakan bahwa Yang bisa ditindak jika tindak pidana, misalnya ada yang berakibat korban luka atau tewas.⁴⁷ Adapun Upaya pencegahan yang bisa dilakukan menurut beliau antara lain yaitu:⁴⁸

- 1) Memandang masa remaja merupakan masa dimana gejala emosi dan tekanan jiwa sedang gencar dialami, perilaku mereka mudah menyimpang, sehingga perlu adanya pengawasan yang cukup. Pelajar perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat mengembangkan bakat yang dimiliki, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah, belajar dan sebagainya.
- 2) Pencegahan yang dilakukan keluarga seperti:
 - a) Mengasuh anak dengan baik.
 - b) Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat
 - c) Meluangkan waktu untuk bersama anak
 - d) Menadi contoh-contoh yang baik dengan tidak menunjukkan perilaku yang agresif.
 - e) Memperkuat pengetahuan agama.
- 3) Pencegahan yang dilakukan oleh Sekolah seperti:
 - a) Melaksanakan kurikulum pendidikan yang baik
 - b) Adanya ruang untuk kegiatan olahraga, karena tempat tersebut perlu untuk penyaluran agresivitas.
 - c) Sekolah yang siswanya terlibat tawuran perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu untuk bersama-sama mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak, Kompol Darto, Kasat Binmas Polresta Padang, Hari Rabu 18 Februari 2019, Bertempat di Polresta Kota Padang.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak, Kompol Darto, Kasat Binmas Polresta Padang, Hari Rabu 18 Februari 2019, Bertempat di Polresta Kota Padang.

⁴⁸ *Ibid.*

2. Upaya Di Luar Hukum Pidana

Upaya di luar hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sasaran utama dari upaya non penal adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁴⁹ Beberapa upaya yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Padang adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyuluhan hukum
- 2) Melakukan patroli dan pengawasan secara rutin

Berdasarkan wawancara Bapak Kumpul Darto aksi tawuran pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Pukul 16.30 WIB bertempat di Lap. Imam bonjol Kota Padang telah terjadi Tawuran antar SMK KOSGORO dan SMA PERTIWI 2, kejadian tersebut berawal dari memperebutkan tempat kekuasaan, mereka secara bersama dan terang-terangan melakukan aksi tersebut kemudian terjadi aksi kekerasan yang bermula dari kejar-kejaran sehingga melempar batu yang menyebabkan warung dan kendaraan milik masyarakat rusak, anggota SPK Polisi Resor Kota Padang kemudian berhasil mengamankan 9 orang pelaku yang selanjutnya diamankan di Polisi Resor Kota Padang.⁵⁰ Oleh sebab itulah pelaku tawuran masih kerap melakukan tawuran, faktor alasan balas dendam yang menyebabkan tawuran itu terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan perlu terobosan regulasi yang baru untuk mengatur mengenai aksi tawuran, baik itu dengan aksi kekerasan maupun tidak dengan aksi kekerasan.

Mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan,

kempauan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵¹ Artinya berdasarkan pertanggungjawaban hukum siswa sebagai pelaku tawuran harus bertanggungjawab atas perbuatan tercela yang dilakukannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana yang dilakukan Polisi Resor Kota Padang terhadap pelaku tawuran antara pelajar di wilayah hukum Kota Padang belum efektif terlaksana, sementara penegakan hukum itu sendiri dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Apabila penegakan hukum terhadap pelajar yang melakukan tawuran tidak efektif maka menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum.
2. Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di wilayah hukum Kota Padang adalah pertama kurangnya sarana yang memadai yakni kendaraan untuk melakukan patroli masih sangat terbatas, sehingga pihak polisi masih sulit menjangkau gang-gang kecil untuk memantau keadaan yang dikatakan sebagai tempat rawan terjadinya tindak kenakalan remaja, kedua kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan ketiga kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka semakin berkurangnya masyarakat yang mau melaporkan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat kepada polisi, dan karena laporan kejadian itu tidak sampai kepada Kepolisian, maka Polisi tidak akan mengetahui informasi bahwa telah terjadi suatu tindakan kenakalan remaja di suatu tempat.
3. Upaya Polisi Resor Kota Padang dalam mengantisipasi terjadinya pelaku tawuran pelajar

⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Kumpul Darto, Kasat Binmas Polresta Padang, Hari Rabu 18 Februari 2019, Bertempat di Polresta Kota Padang.

⁵¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006, hlm 335-337

ada dua yaitu pertama upaya hukum pidana seperti menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya pencegahan yang bisa dilakukan menurut pihak Kepolisian Resor Kota Padang yaitu: memandang masa remaja merupakan masa dimana gejala emosi dan tekanan jiwa sedang gencar dialami, upaya pencegahan yang dilakukan keluarga dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Sekolah. Kedua upaya di luar hukum pidana yaitu seperti melakukan penyuluhan hukum dan melakukan patroli dan pengawasan secara rutin.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Padang agar mendukung pihak kepolisian dan pihak TNI untuk bekerjasama dalam mengamankan dan mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, sehingga kedepannya bisa mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar di Kota Padang.
2. Kepada Kepolisian Resor Kota Padang agar mampu mengatasi kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelajar yang melakukan tawuran. Dan menjalankan upaya-upaya dalam mengantisipasi terjadinya pelaku tawuran pelajar seperti upaya hukum pidana dan upaya hukum di luar hukum pidana.
3. Kepada masyarakat agar memberikan kepercayaan pada aparat penegak hukum untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana. Dan kepada orang tua agar melakukan pengawasan dengan baik terhadap anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Banjary, Syaifurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta.
- Anton, Tabah, 1996, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*, CV. Sahabat, Klaten.

Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial(Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media grup, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, cetakan ke-14, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta.

Wadong, Maulana Hasan 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

Patricia Van Horn, "The Court's Role In Supporting And Protecting Children Exposed To Domestic Violence", *Journal of the Center for Families*, 2005.

Sanjeev S. Anand, "The Criminal Justice System and Youth Crime Prevention", *Queen's Law Journal*, 1999.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d00a30030933/tawuran-dan-bully-berakhir-pada-hukum--/> diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4541315/26-orang-pelaku-tawuran-di-padang-ditangkap>.diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

<https://hukumonline.com/berita/d-4541315/2/menelisik-penyebab-terjadinya-tawuran-antar-pelajar>.diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

<http://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>diakses, tanggal, 4 Februari 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>, diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

<http://padang.go.id/konten/sejarah-kota-padang> diakses 18 November 2019

<https://covesia.com/archipelago/baca/84700/gambaran-dan-sejarah-kota-padang> diakses 18 November 2019

<https://restapadang.wordpress.com/> diakses 18 November 2019